

## **PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN**

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*  
Nomor : 19 Tahun 1973

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

#### **Menimbang:**

- a. Bahwa bidang pertambangan mempunyai fungsi yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pertahanan negara, sehingga perlu diadakan pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
- b. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur keselamatan kerja secara umum termasuk bidang pertambangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
- c. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan usaha-usaha pertambangan yang merupakan proses yang terus menerus, membutuhkan peralatan yang khusus dan menghadapi kemungkinan bahaya yang mempunyai tingkat berulangnya kecelakaan membawa korban manusia dan tingkat kengerian kecelakaan yang begitu besar dan khas, dianggap perlu untuk mengadakan penyelenggaraan pengawasan keselamatan kerja yang lebih efisien dan efektif
- d. Bahwa Departemen Pertambangan telah mempunyai peronil dan peralatan yang khusus untek menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan;
- e. Bahwa karena perlu diadakan ketentuan tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan antara Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Pertambangan.

#### **Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133; TLN Republik Indonesia Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1967 (LN Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22; TLN Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 14 Prp. Tahun 1969 (LN Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 55
5. Undang-undang Nomor 1 Prp. Tahun 1970 (LN Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; TLN Republik Indonesia Nomor 2918);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
7. Mijn Politie Reglement (Staatsblad 1930 Nomor 341);

### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan:**

Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan dan pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

#### **Pasal 1**

Pengaturan keselamatan kerja dibidang pertambangan termaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 dilakukan oleh Menteri Pertambangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

#### **Pasal 2**

Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;

### **Pasal 3**

1. Untuk pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan Menteri Pertambangan mengangkat pejabat-pejabat yang akan melakukan tugas tersebut setelah mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
2. Pejabat-pejabat termaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya mengadakan kerjasama dengan Pejabat-pejabat Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi baik di Pusat maupun di Daerah.

### **Pasal 4**

Menteri Pertambangan memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi mengenai pelaksanaan pengawasan termaksud dalam Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 5**

Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi peraturan dan pengawasan terhadap Ketel Uap sebagaimana termaksud dalam Stoom Ordonnantie 1930 (Stbl 1930 Nomor 225)

### **Pasal 6**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 April 1973  
Presiden Republik Indonesia

Soeharto

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 April 1973  
Menteri /sekretaris negara Republik Indonesia

Soedarmono, S.H  
Mayor Jenderal TNI